

**LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEBO**



TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, atas kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo sehingga Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 ini dapat disusun.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2019 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo. Melalui Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) ini kami sampaikan dengan harapan agar pembaca dapat memahami upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja bersama Kabupaten Tebo.

Muara Tebo, Januari 2020
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tebo


Himawan Susanto, S.E,M,Ec,Dev
NIP. 197301103 200501 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Gambaran Umum OPD.....	4
1.4. Fungsi Strategis OPD	7
1.5. Permasalahan utama yang dihadapi.....	9
1.6. Sistematika Penulisan	9
BAB II PERJANJIAN KINERJA.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018.	
3.1. Evaluasi akuntabilitas Kinerja.....	14
3.2. Akuntabilitas Keuangan	14
BAB IV PENUTUP	
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	17
4.2. Strategi untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang	17
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan bidang komunikasi dan informatika telah membawa dampak perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Meski dengan adanya era keterbukaan informasi, namun keberagaman masyarakat dari tingkat Pendidikan, budaya, dan kondisi geografis wilayah serta ketersediaan infrastruktur tak dipungkiri bahwa masih terjadi kesenjangan informasi (*digital divide*) pada sebagian kelompok masyarakat. Hal ini tentu menjadi tugas pemerintah bersama masyarakat untuk mengurangi kesenjangan tersebut, yakni dengan melakukan diseminasi informasi guna memfasilitasi kemudahan dalam memperoleh informasi. Pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial merupakan upaya yang perlu perhatian yang mendalam.

Seiring dengan hal diatas, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan sarana penunjang yang sangat vital terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Implementasi *e-government* yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dimaksudkan sebagai peningkatan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif adalah konsep yang sinergis antara penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka perlu menyusun laporan kinerja (LKj) di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2019, sehingga LKj merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo sesuai dengan sistematika LKj yang meliputi maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran, indikator kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian kegiatan (*target*), sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan bidang komunikasi dan informatika kepadamasyarakat.

Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah

mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Penyusunan laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo, dimaksudkan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Dengan adanya laporan kinerja ini dapat meningkatkan peran bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo untuk mendukung terciptanya *Good Governance* atau pemerintahan yang baik.

1.2 Dasar Hukum

Adapun ketentuan yang dijadikan dasar hukum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Tebo Nomor 8 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 3 (Tiga) Bidang, Unit Pelaksana teknis dinas dan Kelompok Jabatan fungsional, dengan susunan sebagai berikut :

a) Susunan Kepegawaian

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - Sub bagian umum dan kepegawaian;
3. Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, terdiri dari:
 - Seksi Layanan Pengelolaan Informasi Publik;
 - Seksi Layanan Pengelolaan Komunikasi Publik.
4. Bidang Penyelenggaraan Data Statistik dan *e-Government*, terdiri dari:
 - Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - Seksi Pengelolaan Data Statistik.
5. Bidang Sandi Daerah, terdiri dari:
 - Seksi Administrasi Persandian;

- Seksi Pembinaan Sumber daya Manusia dan Persandian;

Sedangkan untuk jumlah personil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo berdasarkan Pangkat, Pendidikan, Golongan/Ruang gaji, dapat dilihat pada lampiran sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang

No	Pangkat	Golongan	Ruang	Jumlah Pegawai
1.	Juru Muda	I	a	0
2.	Juru Muda Tingkat I	I	b	0
3.	Juru	I	c	0
4.	Juru Tingkat I	I	d	0
5.	Pengatur Muda	II	a	0
6.	Pengatur Muda Tingkat I	II	b	0
7.	Pengatur	II	c	0
8.	Pengatur Tingkat I	II	d	0
9.	Penata Muda	III	a	7
10.	Penata Muda Tingkat I	III	b	0
11.	Penata	III	c	5
12.	Penata Tingkat I	III	d	4
13.	Pembina	IV	a	4
14.	Pembina Tingkat I	IV	b	0
15.	Pembina Utama Muda	IV	c	0
16.	Pembina Utama Madya	IV	d	0
17.	Pembina Utama	IV	e	0

Tabel 1.2. Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Sekolah Dasar (SD)	-
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	3
4	Diploma Tiga (D-3)	2
5	Strata Satu (S1)	12
6	Strata Dua (S2)	3
7	Starata Tiga (S3)	-
	Jumlah	20

1.4 Fungsi Strategis OPD

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo untuk mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai.

Adapun tujuan strategis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo adalah **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi”**.

a) Sasaran

Sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo merupakan penjabaran tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo. Adapun sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika adalah **“Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, penyebarluasan informasi dan keamanan komunikasi dan informasi”**.

b) Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo berdasarkan Rencana Strategis tahun 2017-2022 dirumuskan sebagai berikut :

1. Strategi dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan beberapa strategi sebagai berikut:
 - Kualitas tata kelola pemerintahan
 - Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, penyebarluasan informasi dan keamanan komunikasi dan informasi
 - Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik
 - Meningkatnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
 - Meningkatnya informasi statistik sektoral
 - Meningkatnya keamanan sistem persandian
2. Kebijakan dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo menetapkan beberapa kebijakan pembangunan sebagai berikut:
 - Meningkatkan dan mengembangkan kualitas unit kerja dalam pelayanan publik untuk *mewujudkan clean goverment dan good government.*
 - Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan, serta memanfaatkan IPTEK untuk peningkatan daya saing.
 - Optimalisasi pengelolaan dan penyediaan database Pemerintah Kabupaten Tebo.
 - Menciptakan manajemen pemerintah yang didasarkan pada data akurat dan terkini.
 - Mendorong tumbuh kembangnya komunikasi data berbasis internet dan protocol internet.
 - Meningkatkan intensitas interaksi komunikasi antar pemerintah dan masyarakat dalam mengelola opini publik
 - Meningkatkan peningkatan kualitas SDM sesuai tugas

dan kompetensi.

- Memenuhi standar minimal peralatan sarana komunikasi dan desiminasi informasi
- Mendorong peningkatan mutu pelayanan data dan produksi
- Memenuhi standar minimal sarana dan prasarana pengelolaan data dan produksi
- Menyediakan pedoman dan fokus arah kebijakan organisasi
- Mendorong peningkatan disiplin aparatur.

1.5 Permasalahan Utama yang dihadapi

Dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo telah dilaksanakan serangkaian kajian yang bertujuan untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang mampu menjawab tantangan yang ada serta sejauh mungkin dapat memenuhi tuntutan segenap *stakeholders*, masih dijumpai berbagai permasalahan yang menghambat kinerja antara lain :

1. Jumlah ASN berbasis IT belummemadai
2. Tingkat kesadaran ASN terhadap tugas pokok dan fungsi belum optimal
3. Masih rendahnya dukungan dana dari APBD sehingga program dan kegiatan belum optimal
4. Belum terbinanya koordinasi yang baik antar OPD terhadap pemahaman komunikasi dan informatika

1.6 Sistematika Penulisan

BAB.I.PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Gambaran Umum Organisasi
 - Susunan kepegawaian
 - Sarana dan prasarana

1.4 Fungsi StratetegisOPD

- Tujuan
- Sasaran
- Strategis
- Kebijakan

1.5 Permasalahan Utama yangdihadapi

1.6 SistematikaPenulisan

BABII PERJANJIANKINERJA

BABIII. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

3.1 Evaluasi AkuntabilitasKinerja

3.2 Akuntabilitas Keuangan

BAB.IV. PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

4.2 Strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang

BAB II
PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Indikator kinerja sasaran merupakan hal yang harus dilakukan, guna mengukur keberhasilan yang telah dicapai, berikut adalah Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2019, sebagai berikut.

Tabel. 2. 1. Target Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2019.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan, Pelayanan publik, penyebarluasan informasi dan keamanan komunikasi dan informasi	Persentase Cakupan jangkauan TIK	5%
		Persentase Diseminasi informasi publik kepada masyarakat Kabupaten Tebo	50%
		Persentase Pengamanan informasi daerah	30%

Tabel. 2.2. Rencana Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2019.

No	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1	Proram Pelayanan Administrasi Perkantoran	640.490.800
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	4.000.000
2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	287.450.000
3	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perinzinan kendaraan dinas/operator	940.800
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ operasional	17.700.000
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	80.400.000
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	31.500.000
7	Penyediaan jasa perbaikan perlaratan kerja	10.000.000
8	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000
9	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	15.000.000
10	Penyediaan komponen instansi listrik /penerangan bangunan	3.500.000
11	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000
13	Penyediaan makan dan minum	10.000.000
14	Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150.000.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	97.760.000
1	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	25.000.000
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operator	72.760.000
3	Program Peningkatan Displin Aparatur	10.000.000

	2	Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu	10.000.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		20.000.000
	1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	20.000.000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan		2.000.000
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktiar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa		305.000.000
	1	Penyelenggaraan E-Goverment	305.000.000
7	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		20.000.000
	1	Penyelenggaraan Pameran Investasi	20.000.000
8	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		75.000.000
	1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	75.000.000
Jumlah			1.170.250.800

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

3.1 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pelaksanaan Evaluasi kinerja dengan pengukuran kinerja yang merupakan Penetapan Kinerja dan Penetapan Capaian Indikator Kinerja. Agar mendapatkan gambaran yang lebih kongkrit mengenai Pencapaian Kinerja atau Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2019.

Tabel. 3.1. Realisasi Target Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2019.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan, Pelayanan publik, penyebarluasan informasi dan keamanan komunikasi dan informasi	Persentase Cakupan jangkauan TIK	5%	2 OPD Bapelitbangda dan BKPSDM	49%
		Persentase Diseminasi informasi publik kepada masyarakat Kabupaten Tebo	50%	Terdiseminasi nya informasi publik kepada masyarakat Kabupaten Tebo	0%
		Persentase Pengamanan informasi daerah	30%	Terjaminnya keamanan informasi daerah	0%

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dimulai dengan pengukuran kinerja yang merupakan Penetapan Indikator Kinerja Penetapan Capaian Indikator Kinerja. Agar mendapatkan gambaran yang lebih kongkrit mengenai akuntabilitas keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2019.

Pada Tahun 2019, target realisasi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2019 sebesar Rp. 1.170.250.800,- dan

hanya terealisasi sebesar Rp. 1.144.790.967,- atau sekitar 97,82 persen dari target sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2018 target sebesar Rp. 1.068.816.400,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 928.589.787,00,- atau sekitar 86,88 persen.

Dengan adanya peningkatan baik dilihat dari jumlah anggaran maupun prosentase fisik diharapkan akan semakin baik juga kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo, berikut realisasi Anggaran kegiatan tahun 2019.

Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019.

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Proram Pelayanan Administrasi Perkantoran	640.490.800	621.721.944	97,07
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	4.000.000	3.600.000	90,00
2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	287.450.000	286.161.792	99,55
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan	940.800		0
4	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operator	17.700.000	5.479.000	30,95
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	80.400.000	80.400.000	100
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	31.500.000	31.500.000	100
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000	9.740.000	97,40
8	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000	20.000.000	100
9	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	15.000.000	15.000.000	100
10	Penyediaan komponen instansi listrik /penerangan bangunan	3.500.000	3.500.000	100
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000	9.960.000	99,60
12	Penyediaan makan dan minum	10.000.000	9.997.750	99,98

	13	Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150.000.000	149.979.802	99,99
2	Program Peningkatan Serana dan Praserana Aparatur		97.760.000	97.431.149	99,66
	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	25.000.000	24.671.500	98,69
	2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	72.760.000	72.759.649	99,99
3	Program Peningkatan Displin Aparatur		10.000.000	10.000.000	100
	1	Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu	10.000.000	10.000.000	100
4	Program Peningkatan Displin Aparatur		20.000.000	19.750.000	98,75
	1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	20.000.000	19.750.000	98,75
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan		2.000.000	2.000.000	100
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktiar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	100
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa		305.000.000	298.110.078	97,74
	1	Penyelenggaraan E-Government	305.000.000	298.110.078	97,74
7	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		20.000.000	17.292.000	86,46
	1	Penyelenggaraan Pameran Investasi	20.000.000	17.292.000	86,46
8	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		75.000.000	74.889.396	99,85
	1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	75.000.000	74.889.396	99,85
Jumlah			1.170.250.800	1.144.790.967	97,82

BABIV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

LKj menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi, dalam masa-masa awal implementasi, LKj juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2019), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJM. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2019, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkrit untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan yang semakin baik.

4.2. Strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang

- a. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan Publik yang

berkualitas berbasis teknologi.

- b. Strategi dan arah kebijakan yang mendukung tersebarnya informasi pembangunan kepada masyarakat yang akurat dan akuntabel serta mendorong terciptanya lingkungan yang aman tentram dan kondusif ditengah-tengah masyarakat.
- c. Strategi dan arah kebijakan guna mewujudkan Keamanan informasi daerah.